



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2021 - 2022**

KAMIS, 16 DESEMBER 2021

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

Yang kami hormati:

- Para Wakil Ketua DPR RI;
- Para Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI;
- Para Anggota DPR RI;
- Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan anugerahNya kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Masa Persidangan II telah

berlangsung sejak tanggal 1 November 2021 dan akan berakhir pada hari ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Atas nama Pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur.

DPR RI juga memberikan perhatian atas musibah banjir yang melanda di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan, serta gempa bumi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

DPR RI mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah bekerja cepat dalam melakukan upaya tanggap

darurat. Pemerintah agar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak bencana.

DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, akan memastikan agar upaya Pemerintah dalam penanganan dampak bencana dapat berjalan optimal.

DPR RI mengundang seluruh masyarakat untuk ikut mengambil peran dan tanggung jawab, bergotong-royong, dalam meringankan beban warga terdampak bencana banjir dan erupsi Semeru.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR RI telah menetapkan 40 RUU sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2022, dengan rincian:

- 26 RUU diusulkan oleh DPR,
- 12 RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan
- 2 RUU diusulkan oleh DPD.

DPR RI juga menetapkan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 247 RUU menjadi 254 RUU.

Prolegnas, merupakan upaya pembentuk Undang Undang, DPR RI dan Pemerintah, dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional untuk mewujudkan amanat UUD 1945, yaitu untuk melindungi, mensejahterahkan, mencerdaskan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam menyelenggarakan mekanisme pembentukan Undang Undang, DPR RI dan Pemerintah, semakin dituntut untuk dapat memenuhi landasan dan tata kelola pembentukan Undang Undang yang selaras dengan UUD 1945, peraturan perundang-undangan, menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendengarkan aspirasi dari rakyat.

DPR RI dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan fungsi legislasi, akan memperkuat tata kelola pembentukan Undang Undang, yaitu taat pada landasan hukum, tertib prosedur, terbuka, dan mendengarkan aspirasi rakyat.

DPR RI menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya DPR RI berkomitmen untuk segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersama Pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR RI, melalui Komisi dan AKD terkait, telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021. Fokus kebijakan fiskal pada tahun 2021, masih diarahkan pada penanggulangan Pandemi Covid-19,

Program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian Program Strategis Nasional.

Pada tahun 2021, anggaran program penanggulangan Pandemi dan PEN ditetapkan sebesar Rp 699,43 triliun. Program pemulihan ekonomi dan sosial tersebut diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha.

Setiap Komisi dan AKD DPR RI, melalui fungsi anggaran, melakukan upaya agar Pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hadir dalam menanggulangi urusan rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan religius.

Dalam situasi Pandemi Covid 19, penyelesaian program strategis nasional menjadi sangat penting agar tidak menjadi proyek mangkrak. Oleh karena itu diperlukan strategi yang efektif dalam

menyelesaikannya ditengah kondisi fiskal yang tertekan untuk kebutuhan penanganan Pandemi covid-19.

Selanjutnya, DPR RI mengapresiasi telah diteruskannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian dan lembaga serta para gubernur sebagai tindak lanjut telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan DIPA tersebut agar dapat dikelola dengan efektif dan efisien sehingga sejak awal tahun 2022, berbagai program pemerintah telah hadir dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melakukan fungsi pengawasan, DPR RI memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan

kerja, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, peningkatan kualitas layanan publik, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan kinerja aparatur pemerintah.

Pada Masa Persidangan II ini, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah memperhatikan berbagai permasalahan, baik dari kinerja kementerian dan lembaga, maupun berbagai masalah yang menjadi perhatian rakyat.

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat antara lain adalah:

- Praktik Mafia Tanah;
- Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual;
- Perlindungan Konsumen Industri Jasa Keuangan
- Program Vaksinasi Anak Usia 6-12 tahun;
- Antisipasi masuknya varian Omicron ke Indonesia;

- Tingginya harga bahan makanan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2022;
- Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi lonjakan Covid 19 setelah Natal dan Tahun Baru 2022;
- Penanganan bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2021;

DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya, memiliki komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

Menjelang Natal dan Tahun Baru, DPR RI mengapresiasi keputusan Pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama periode libur Natal dan Tahun Baru sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah agar tetap siaga dalam mengawasi aktivitas masyarakat di ruang publik, terutama di pusat

perdagangan dan objek wisata, serta mobilitas masyarakat, untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Demikian pula dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, aparat keamanan agar dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam menjalankan peran diplomasi parlemen, Delegasi DPR RI pada masa sidang ini telah menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan kerja sama antarparlemen, demi memperjuangkan kepentingan nasional dan menyuarakan pandangan Indonesia atas berbagai persoalan internasional.

Delegasi DPR RI juga telah melakukan kunjungan dan juga menerima kunjungan parlemen dan duta besar beberapa negara sahabat demi membangun hubungan

kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang.

Diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI, diarahkan untuk memperkuat upaya global dalam melakukan pemulihan sosial dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, akses vaksin bagi seluruh rakyat, serta mitigasi global dalam mengantisipasi krisis sosial dan ekonomi kedepan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial sangat ditentukan oleh kemampuan kita dalam mengantisipasi penyebaran pandemi, memperkuat imunitas, dan adaptasi tata sosial ekonomi masyarakat yang baru, hidup dalam situasi ketidakpastian Pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, melalui fungsi konstitusional kita dituntut ikut mengambil peran dan tanggung jawab

sebagai Anggota DPR RI dalam penanganan pandemi, bergotong-royong bersama rakyat dalam membangun tata sosial dan ekonomi yang baru dalam situasi Pandemi Covid 19, sehingga dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional.

Saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

Kepada Yang Terhormat Anggota DPR RI, pergunakanlah kesempatan reses ini untuk membangun kebersamaan bersama rakyat di daerah pemilihan masing-masing, membangun ketahanan sosial, sampaikan juga tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh Dewan, dan persatukanlah rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia yang sejahtera, maju dan berkepribadian.

Kami ucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi Anggota yang merayakannya dan Selamat Tahun Baru 2022 untuk kita semua.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om shanti shanti shanti om.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. (H.C) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN

Pada Masa Persidangan II ini DPR telah menyelesaikan 6 (enam) Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) yaitu:

1. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
2. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat;
3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata saha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
4. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama

Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;

5. RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; dan
6. RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap:

1. Calon tunggal Panglima TNI, yaitu Jenderal Andika Perkasa.
2. 2 (dua) Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia, yaitu:
 1. Juda Agung;
 2. Aida S. Budiman;

Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 247 RUU menjadi 254 RUU. Perubahan ini dikarenakan adanya:

- Penarikan 2 RUU usulan Pemerintah, yaitu RUU tentang Pajak Penghasilan dan RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa.
- Penambahan 9 RUU dalam Prolegnas Tahun 2020-2024, terdiri dari:
 - a. 4 (empat) RUU usulan DPR;
 1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara,
 2. RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI,
 3. RUU tentang Wisata Khusus, dan
 4. RUU tentang Tindak Pidana Kesusilaan;
 - b. 2 (*dua*) RUU usulan Pemerintah;
 1. RUU tentang Pelelangan dan
 2. RUU tentang Penilai.
 - c. 3 (*tiga*) RUU usulan DPD.

1. RUU Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
2. RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara, dan
3. RUU tentang Pemerintahan Digital

Delegasi DPR RI antara lain menghadiri:

1. COP26 Parliamentary Meeting di Glasgow untuk turut berkontribusi pada upaya dunia mengatasi persoalan perubahan iklim serta rangkaian pertemuan working group;
2. Pertemuan Tahunan ke-29 APPF untuk mengupayakan sejumlah resolusi bagi berbagai persoalan di kawasan Asia Pasifik; dan
3. Menghadiri rangkaian Sidang the 11th Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEP-11), dan Sidang IPU ke-143 di Madrid yang antara lain membahas krisis kemanusiaan dan turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

